

Investasi atau Judi? Memutus Siklus "Cepat Kaya" di Indonesia

Tahun 2022, kita digegerkan oleh kasus Indra Kenz (Binary Option). Dua tahun kemudian, di 2024, muncul kasus Ahmad Rafif (Influencer Saham). Kini, di awal 2026, nama "Younger" membuat laporan kerugian 3 miliar rupiah ke Polda Metro Jaya akibat kelas kripto.

Apakah anda melihat polanya? Hampir setiap dua tahun, siklus ini berulang. Mulai dari janji manis, ribuan korban, dan kerugian triliunan. Tokohnya berganti, tapi tragedinya sama. Pertanyaan besarnya bukan "siapa pelakunya?", melainkan mengapa masyarakat kita terus-menerus jatuh ke lubang yang sama?

Mudah bagi kita untuk melabeli para korban sebagai orang yang 'serakah' atau 'bodoh'. Namun, fakta menunjukkan masalah yang jauh lebih struktural. Berdasarkan data standar global Upper Middle-Income Class (UMIC) World Bank 2025, kerentanan ekonomi masyarakat kita ternyata masih sangat tinggi. Tercatat 60,3 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah batas aman tersebut. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi kita pada posisi yang mengkhawatirkan, bahkan ketika disandingkan dengan negara yang sedang berjuang seperti Zimbabwe yang memiliki angka 80 persen.

Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang, tapi soal hilangnya "Cognitive Bandwidth". Ketika pikiran seseorang habis tersita untuk memikirkan "besok makan apa", kapasitas otak untuk memikirkan risiko jangka panjang menjadi lumpuh. Mereka tidak mencari investasi, mereka mencari jalan keluar instan.

Ini alasan mengapa Judi Online (Judol) laku keras. Data PPATK menunjukkan 80% pemain Judol adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Ironisnya, perputaran uangnya melonjak dari Rp 327 triliun (2023) menjadi Rp 1.000 triliun (2024). Ini bukan investasi melainkan sebuah keputusan yang dieksploitasi.

Jika kita ingin memutus siklus ini demi mencapai SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi), solusinya bukan sekadar menangkap pelaku, tapi membangun "imun" masyarakat terhadap pembodohan yang terjadi di dunia digital ini.

Kita membutuhkan integrasi kurikulum finansial yang terstandarisasi dalam sistem pendidikan nasional. Di sinilah teknologi berperan sebagai jembatan. Melalui aplikasi pendidikan yang terintegrasi dengan Kemendikbud, kita bisa memastikan bahwa materi literasi keuangan yang diterima siswa di Jakarta sama kualitasnya dengan siswa di pelosok desa. Aplikasi ini bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memastikan setiap anak Indonesia paham bedanya "investasi" dengan "judi".

Selama masyarakat kita masih menganggap kekayaan bisa didapat dalam semalam, kasus "Younger" berikutnya pasti akan terjadi lagi di 2028. Mari kita berhenti menyalahkan korban, dan mulai memperbaiki sistem pendidikan kita. Jangan sampai bonus demografi kita di 2045 nanti justru berisi generasi yang miskin karena berjudi, bukan kaya karena berinvestasi.